MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 25 No 1 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK: ANALISIS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DKI JAKARTA YANG EFEKTIF

Author: Indri Kharisma S.E., M.M[1], Putri Andini[2], Nurul Syafika[3], Hafiz Maulana[4]
Jurusan Manajemen Keuangan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang
E-mail: dosen02474@unpam.ac.id[1], andiniputri0704@gmail.com[2], yuyufiqa21@gmail.com[3], hafis5381@gmail.com[4]

Abstract
This study aims to analyze the effectiveness of the management of the Jakarta Regional Budget (APBD), focusing on planning, implementation, administration, reporting, and oversight. The research method uses a qualitative-descriptive approach through a literature review and secondary data analysis. The results indicate that the effectiveness of APBD management is influenced by the quality of performance-based planning, the accuracy of revenue projections, budget discipline, transparency, and internal and external oversight. This study provides recommendations for improving information technology integration, strengthening apparatus capacity, and optimizing public participation.
Keywords: APBD, DKI Jakarta, Public Financial Management, Budget Effectiveness, Public Sector

Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta dengan fokus pada perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pengawasan. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif melalui kajian literatur dan analisis data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan APBD dipengaruhi oleh kualitas perencanaan berbasis kinerja, akurasi proyeksi pendapatan, disiplin anggaran, transparansi, serta pengawasan internal dan eksternal. Studi ini memberikan rekomendasi untuk meningkatkan integrasi teknologi informasi, penguatan kapasitas aparatur, dan optimalisasi partisipasi publik.
Kata Kunci: APBD, DKI Jakarta, Manajemen Keuangan Publik, Efektivitas Anggaran, Sektor Publik

Article history
Received: Desember 2025
Reviewed: Desember 2025
Published: Desember 2025

Plagirism checker no 80
Doi : prefix doi : 10.8734/musytari.v1i2.365
Copyright : author
Publish by : musytari

This work is licensed under a creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license

1. Pendahuluan

Manajemen keuangan sektor publik merupakan proses pengelolaan sumber daya keuangan pemerintah secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. APBD merupakan instrumen utama pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan publik dan pembangunan daerah. DKI Jakarta, sebagai pusat pemerintahan dan perekonomian nasional, memiliki APBD terbesar di Indonesia, sehingga efektivitas pengelolaannya sangat krusial.

Manajemen keuangan sektor publik merupakan rangkaian proses yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, hingga pertanggungjawaban atas penggunaan sumber daya keuangan negara atau daerah. Dalam konteks pemerintahan modern, manajemen keuangan sektor publik tidak hanya berfokus pada pengelolaan dana, tetapi juga pada upaya menciptakan public value melalui penyediaan layanan publik yang efektif dan

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 25 No 1 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

efisien. Pemerintah dituntut untuk mampu mengelola anggaran secara profesional dan transparan, sehingga setiap rupiah yang digunakan dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Sektor publik merupakan bagian dari sistem pemerintahan yang bertanggung jawab dalam penyediaan layanan publik, pengelolaan sumber daya negara, serta pelaksanaan program pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berbeda dengan sektor privat yang berorientasi pada keuntungan, sektor publik memiliki tujuan utama untuk menciptakan public value melalui pelayanan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Perkembangan sektor publik semakin kompleks seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat, dinamika ekonomi, serta tuntutan terhadap kualitas layanan publik. Modernisasi administrasi pemerintahan juga menuntut sektor publik untuk mengadopsi prinsip-prinsip good governance seperti akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan transparansi.

Perkembangan lingkungan strategis, seperti globalisasi, kemajuan teknologi, dan perubahan kebutuhan masyarakat, menuntut sektor publik untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan. Pemerintah harus menerapkan prinsip good governance yang mencakup akuntabilitas, transparansi, responsivitas, serta efektivitas dalam penggunaan anggaran. Hal ini semakin relevan mengingat meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pengelolaan anggaran yang bersih dan bebas dari korupsi. Penerapan sistem berbasis elektronik seperti e-budgeting, e-planning, dan e-government menjadi langkah penting menuju pengelolaan keuangan yang lebih modern.

2. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif yang berfokus pada analisis mendalam terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan secara komprehensif proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pengawasan anggaran daerah berdasarkan dokumen resmi, data keuangan, serta regulasi yang berlaku. Sumber data utama penelitian ini berasal dari berbagai dokumen pemerintah daerah seperti Laporan Realisasi APBD, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), dokumen audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta kebijakan terkait pengelolaan keuangan publik. Selain itu, penelitian ini juga merujuk pada literatur akademik dan penelitian terdahulu guna memperkuat analisis.

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik. Pertama, studi dokumentasi, yaitu dengan menelaah laporan keuangan, peraturan daerah, dokumen perencanaan seperti RKPD dan RPJMD, serta sistem yang digunakan pemerintah seperti e-budgeting dan e-planning. Teknik ini bertujuan untuk memperoleh data factual mengenai struktur pendapatan, pola belanja, dan tingkat realisasi anggaran DKI Jakarta. Kedua, observasi tidak langsung, yaitu dengan meninjau proses dan alur pengelolaan APBD melalui aplikasi dan informasi publik yang disediakan pemerintah daerah, sehingga peneliti dapat memahami mekanisme teknis serta tahapan birokrasi penganggaran. Ketiga, analisis literatur, yaitu dengan mengumpulkan dan mengkaji buku, artikel ilmiah, laporan audit, dan publikasi akademik yang relevan untuk memperkuat landasan teori tentang manajemen keuangan sektor publik dan efektivitas anggaran daerah.

Data yang sudah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif model Miles dan Huberman. Analisis dilakukan melalui proses reduksi data untuk memilih informasi yang paling relevan, penyajian data dalam bentuk narasi agar mudah dipahami, serta penarikan kesimpulan berdasarkan pola dan temuan yang muncul dari dokumen-dokumen tersebut. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan data dari laporan pemerintah, hasil audit BPK, dan literatur akademik agar hasil penelitian lebih objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Melalui metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang akurat mengenai efektivitas pengelolaan APBD DKI Jakarta.

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 25 No 1 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

3. Hasil Dan Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta sangat dipengaruhi oleh berbagai aspek yang saling berkaitan, mulai dari perencanaan anggaran, realisasi pendapatan, pola belanja, hingga kualitas pengawasan internal dan eksternal. Data dari laporan realisasi anggaran, dokumen audit BPK, serta berbagai kebijakan menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan DKI Jakarta telah berada pada arah yang cukup progresif melalui pemanfaatan teknologi dan penerapan sistem penganggaran berbasis kinerja. Namun, penelitian ini juga menemukan sejumlah tantangan yang masih perlu perhatian serius untuk meningkatkan efektivitas anggaran daerah. Untuk memberikan gambaran yang lebih sistematis, pembahasan berikut dirangkum dalam beberapa poin utama.

3.1 Perencanaan anggaran mengalami peningkatan melalui penerapan sistem digital, namun masih dihadapkan pada tantangan koordinasi lintas perangkat daerah.

Perencanaan berbasis kinerja yang digunakan pemerintah DKI Jakarta telah memberikan arah yang lebih jelas terhadap prioritas pembangunan, terutama dalam sektor infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Akan tetapi, hasil telaah dokumen menunjukkan bahwa perbedaan interpretasi program antar perangkat daerah, perubahan kebijakan pusat, serta dinamika politik anggaran sering menyebabkan penyesuaian yang berulang sehingga mempengaruhi ketepatan waktu penyusunan anggaran. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun sistem pendukungnya sudah kuat, koordinasi perencanaan masih memerlukan penguatan untuk memastikan konsistensi dan keselarasan program lintas sektor.

3.2 Realisasi pendapatan daerah menunjukkan kinerja yang stabil, namun dipengaruhi oleh fluktuasi ekonomi dan kepatuhan wajib pajak.

Pajak daerah sebagai penyumbang utama pendapatan menunjukkan tren positif, terutama dari sektor PBB, pajak kendaraan, dan pajak restoran. Namun, beberapa dokumen audit memperlihatkan bahwa masih terdapat potensi kebocoran pendapatan akibat pencatatan yang belum terintegrasi sepenuhnya serta tingkat kepatuhan wajib pajak yang fluktuatif. Kondisi ini menunjukkan bahwa kapasitas pemerintah dalam memproyeksi pendapatan sudah baik, tetapi optimalisasi pemungutan pajak dan pengawasan lapangan perlu diperkuat.

3.3 Pola realisasi belanja mengalami keterlambatan pada beberapa sektor strategis, terutama yang terkait proyek fisik dan pengadaan barang/jasa.

Analisis terhadap realisasi anggaran menunjukkan bahwa serapan anggaran meningkat signifikan pada akhir tahun anggaran, yang mengindikasikan masih sering terjadinya penumpukan kegiatan pada akhir periode. Hal ini umumnya disebabkan oleh proses administrasi yang panjang, ketergantungan pada mekanisme lelang, serta revisi anggaran yang berulang. Keterlambatan tersebut berdampak pada efektivitas program serta kualitas output pembangunan, terutama pada proyek infrastruktur yang membutuhkan kepastian waktu pelaksanaan.

3.4. Akuntabilitas dan transparansi meningkat melalui pemanfaatan berbagai system elektronik, namun partisipasi publik masih perlu diperluas.

Pemerintah DKI Jakarta telah memanfaatkan sistem e-budgeting, e-planning, dan e-purchasing yang memberikan dampak positif terhadap keterbukaan informasi anggaran. Meskipun demikian, hasil pengamatan juga menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap informasi anggaran masih terbatas, sehingga tingkat partisipasi dalam proses perencanaan dan evaluasi belum optimal. Hal ini menunjukkan bahwa transparansi yang bersifat teknokratis perlu dilengkapi dengan edukasi publik agar manfaatnya lebih maksimal.

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 25 No 1 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

3.5. Pengawasan internal dan eksternal menunjukkan perbaikan, tetapi masih ditemukan sejumlah temuan terkait efisiensi program dan pengelolaan aset daerah.

Laporan audit BPK memperlihatkan bahwa meskipun laporan keuangan pemerintah daerah sudah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) secara konsisten, masih terdapat temuan terkait efektivitas program, ketidaksesuaian administrasi, serta penatausahaan aset yang belum tertib. Kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas pengawasan sudah baik, tetapi upaya pembenahan internal masih perlu dilakukan untuk memastikan tidak hanya kesesuaian administrasi, tetapi juga kualitas kinerja program.

Secara keseluruhan, hasil dan pembahasan penelitian ini memperlihatkan bahwa pengelolaan APBD DKI Jakarta telah berkembang ke arah yang lebih modern dan transparan, namun masih membutuhkan penguatan dalam hal koordinasi perencanaan, optimalisasi pendapatan, ketepatan pelaksanaan anggaran, peningkatan partisipasi publik, dan penyempurnaan sistem pengawasan. Poin-poin tersebut menunjukkan bahwa meskipun fundamental pengelolaan keuangan daerah sudah cukup kuat, peningkatan efektivitas anggaran masih memerlukan perbaikan berkelanjutan pada aspek teknis maupun kelembagaan.

4. Kesimpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta telah mengalami perkembangan signifikan melalui penerapan teknologi informasi, penguatan sistem perencanaan berbasis kinerja, serta peningkatan transparansi anggaran. Pemerintah daerah telah menunjukkan komitmen dalam menciptakan tata kelola keuangan yang lebih modern dan akuntabel, terlihat dari pemanfaatan berbagai sistem elektronik seperti e-budgeting, e-planning, dan e-purchasing yang mampu mendorong keterbukaan informasi kepada publik. Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa efektivitas pengelolaan anggaran masih menghadapi sejumlah hambatan, terutama pada aspek koordinasi antar-perangkat daerah, akurasi proyeksi pendapatan, ketepatan realisasi belanja, serta kualitas pengawasan internal dan eksternal. Keterlambatan pelaksanaan anggaran dan ketidaktertiban administrasi aset menunjukkan bahwa masih diperlukan perbaikan yang lebih mendalam pada tahap implementasi kebijakan keuangan daerah.

Selain itu, penelitian ini juga menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan APBD tidak hanya ditentukan oleh kualitas sistem dan teknologi, tetapi juga oleh kapasitas sumber daya manusia yang mengelola anggaran serta tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan evaluasi. Peningkatan transparansi masih perlu diikuti dengan edukasi publik agar masyarakat mampu memahami informasi anggaran dengan baik dan dapat memberikan kontribusi yang lebih berarti dalam pengawasan dan pengambilan keputusan. Dengan demikian, efektivitas pengelolaan keuangan publik akan lebih optimal apabila kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga pengawas dapat terus diperkuat.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan APBD DKI Jakarta telah berada pada jalur yang positif, tetapi tetap memerlukan penyempurnaan berkelanjutan untuk mencapai tata kelola keuangan yang benar-benar efektif, efisien, dan berorientasi pada peningkatan pelayanan publik. Reformasi birokrasi, peningkatan kompetensi aparatur, optimalisasi pendapatan, percepatan realisasi anggaran, serta penguatan sistem pengawasan merupakan faktor kunci yang harus terus diperhatikan agar pengelolaan keuangan daerah dapat memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan kota secara keseluruhan.

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 25 No 1 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

DAFTAR PUSTAKA

[1] Halim, A. (2016). *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
[2] Mahmudi. (2019). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
[3] Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
[4] Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. (2023). *Laporan Realisasi APBD*. Jakarta: BPKD DKI Jakarta.
[5] Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). (2023). *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah DKI Jakarta*.
[6] Kementerian Dalam Negeri. (2022). *Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah*.
[7] Osborne, D. & Gaebler, T. (1992). *Reinventing Government*. Reading: Addison-Wesley.
[8] OECD. (2020). *Public Financial Management: Key Principles and Practices*. OECD Publishing.